

POSISI AMERIKA SERIKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL ¹

Oleh : Vera Ellen Paat²

ABSTRAK

Konflik Palestina-Israel boleh jadi merupakan konflik yang memakan waktu panjang setelah Perang Salib yang pernah terjadi antara dunia Timur dan Barat di sekitar abad keduabelas. Konflik yang telah berlangsung enam puluhan tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Penyelesaian konflik Palestina-Israel, semakin menunjukkan bahwa perdamaian Palestina-Israel memang sulit diwujudkan. Pasalnya, akhir 2008 yang diprediksi dunia Internasional (dalam hal ini Amerika) sebagai puncak penyelesaian konflik Palestina-Israel justru menampakkan kondisi sebaliknya. Fakta lain yang penulis maksud adalah dimensi politik yang juga demikian kental dalam konflik Palestina-Israel. Fakta ini setidaknya ditunjukkan dengan keberpihakan Amerika Serikat sebagai negara adidaya pada Israel. Keberpihakan tersebut semakin terlihat jelas ketika tidak kurang dari puluhan resolusi yang dikeluarkan PBB untuk konflik Palestina-Israel kerap "dimentahkan" Amerika dengan vetonya.

Kata Kunci : *Konflik, PBB, Dunia Internasional*

PENDAHULUAN.

Konflik merupakan permasalahan sosial yang di hadapi oleh banyak negara. Konflik ini berlangsung secara abadi, bahkan tumbuh anggapan bahwa sebelum Israel memberikan otoritas dan pengakuan penuh pada palestina, maka Timur Tengah tidak akan mengenal perdamaian. Selama konflik Palestina-Israel terjadi, banyak bermunculan organisasi-organisasi yang berjuang demi kemerdekaan Palestina, antara lain PLO, Hamas, Jihad Islam. Persengketaan atas sepetak tanah oleh dua kelompok bangsa, Palestina dan Israel, telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak bangsa Israel pertama kali menapakkan kakinya di Palestina. Persengketaan yang berujung pada peperangan itu hingga kini masih belum berakhir. Konflik ini berakar dari klaim bangsa Israel mengenai kepemilikannya atas tanah Palestina. Dimana menurut keyakinan orang Yahudi, Musa diutus Tuhan untuk membawa kembali bangsa Israel ke Tanah yang dijanjikan dan diberkati Tuhan (The Promised Land), setelah mereka berhasil keluar dari kejaran Firaun. Meskipun pada awalnya tanah itu tidak diberitahukan dimana tempatnya, tetapi setelah 40 tahun Musa membawa bangsanya mengembara disekitar kawasan Gurun Sinai, akhirnya mereka sampai di tepi sungai (Yordan). Dihadapannya terpampang tanah yang indah dan subur. Itulah tanah Kana'an (Tanah Palestina) yang mereka yakini sebagai The Promised Land. Tetapi ada satu permasalahan, bahwa diatas tanah tersebut sudah ada penghuni yang telah bermukim selama berabad-abad disana, yaitu bangsa Kana'an dan Filistin (Palestina). Kemudian Musa mengatakan bahwa atas perintah Tuhan, maka tanah itu harus direbut. Inilah salah satu sumber awal dari pertikaian Yahudi (Israel) dengan Palestina. Jadi secara sederhana dapat dikatakan, bahwa nenek moyang orang Yahudi adalah pendatang (imigran) di Tanah Palestina, sedangkan nenek moyang bangsa Palestina telah lebih dahulu mendiami wilayah tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Henry Cattan, seorang ahli hukum Internasional, kelahiran Yerusalem dalam bukunya, "*Palestina, The Arabs and Israel*" (Cattan:1969). Ia menegaskan bahwa secara ilmiah dan objektif bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Tanah Palestina. Tetapi meskipun secara logika pendapat itu dapat mematahkan dalil yang selama bertahun-tahun selalu digunakan kaum Zionis Israel dan para pendukungnya, pada kenyataannya tidak dapat membuat Israel menghentikan segala tindakan okupasinya atas Palestina. Berbagai upaya pun

¹ Skripsi Penulis saat mengikuti ujian akhir pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, FISIP UNSRAT.

digelar demi mendamaikan perang yang telah mengalirkan darah banyak orang tersebut. Negara-negara tetangga, Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai bahkan Negara yang berada dibelahan bumi lain (Amerika Serikat dan Uni Eropa) turut berperan dalam upaya perdamaian ini. Beraneka ragam usulan penyelesaian dan tawaran bantuan pun telah diberikan. Sampai kepada pemberian peringatan dan kecaman pun telah disampaikan. Tetapi sampai kini perdamaian belum juga terwujud. Dalam kasus Palestina-Israel, aspek politik bukanlah satu-satunya dimensi yang dapat digunakan untuk menyoroti konflik kedua negara tersebut, demikian halnya dengan dimensi teologis yang oleh banyak pihak dianggap tidak ada hubungannya dengan konflik ini. Sebagian pihak memandang konflik Palestina-Israel murni sebagai konflik politik, sementara sebagian yang lain memandang konflik ini sarat dengan nuansa teologis. Nuansa teologis dalam konflik Palestina-Israel bukan saja ditunjukkan dengan terbangunnya stigma perang Yahudi-Islam, akan tetapi keyakinan terhadap “tanah yang dijanjikan” sebagai tradisi teologis Yahudi juga tidak dapat dipisahkan dalam kasus ini. Oleh karenanya, tidak ada dari kedua aspek di atas (politik dan teologi) yang dapat dianggap lebih tepat sebagai pemicu konflik Palestina-Israel, karena sepanjang sejarahnya kedua aspek tersebut turut mewarnai konflik. Membentangkan sejarah kelam hubungan Palestina-Israel yang kerap dikerumuni konflik berkepanjangan sama rumitnya dengan melacak sejarah Yahudi itu sendiri, namun upaya ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana konflik tersebut diwarnai oleh nuansa politik maupun teologis.

PEMBAHASAN

(a). Posisi Amerika Serikat.

Di mata Amerika Serikat, Israel adalah sebuah asset strategis yang secara dasar-dasar moral harus didukung penuh karena Israel adalah penganut demokrasi sekuler dengan gaya hidup Barat. Bahkan menduduki posisi-posisi penting dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat seperti Dewan Keamanan Nasional (NSC), Departemen Luar Negeri, Intelejen bahkan Kongres konsisten mendukungnya. Oleh karena itu, tidak seorangpun kandidat presiden Amerika Serikat dalam politik Israel sangat berpengaruh, dalam banyak hal kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah sangat menggambarkan bagaimana komitmen Amerika Serikat dalam mempertahankan hubungan dengan Israel dan menempatkannya sebagai mitra khusus. Dengan status istimewa tersebut, Israel mendapat dukungan politik, ekonomi, dan militer yang luar biasa dari Amerika Serikat, saat menghadapi bahaya. Dan sudah bisa di pastikan dimana posisi Amerika Serikat dalam konflik Palestina-Israel adalah Amerika Serikat lebih cenderung memihak pada sekutunya Israel.

Berikut adalah berbagai perundingan yang telah dilaksanakan antara Israel dan Palestina melalui jasa mediasi Amerika Serikat :

1). Perundingan Oslo I

Perundingan Oslo I berlangsung selama kurang lebih delapan kali dengan 14 kali pertemuan diawali sejak 20-22 januari tahun 1993. Dari perundingan ini dihasilkan suatu kerangka kesepakatan berisi 17 pasal ditambah dengan 4 pasal tambahan, dan dikenal dengan deklarasi prinsip atau DOP (declaration of principles on interim self government arrangement).

2). Perundingan Oslo II

Dalam perundingan Taba (Oslo II) pada tanggal 28 september 1995 guna memperluas wilayah otonomi Palestina, Israel menunjukkan komitmennya untuk mantaati hasil kesepakatan Oslo I dengan kesediaannya untuk mundur dari tujuh kota di tepi barat, yakni : Jenon. Tulkarem, Qalqilyah, Nablus, Bethlehem, Ramallah, dan Hebron. Enam kota yang disebut pertama telah diserahkan kepada pihak palestina pada bulan november dan desember 1995, kecuali Hebron. Untuk wilayah terakhir ini, pemerintah Israel hanya bersedia menyerahkan 80% wilayah pendudukan (area H-1). Sedangkan di seperlima wilayah tersebut (area H-2), pasukan Israel akan tetap bertahan dengan dalih untuk melindungi para pemukim Yahudi.

3). Perundingan Hebron

Pada masa Netanyahu tercapai persetujuan Hebron pada 15 januari 1997 yang Israel bersedia menyelesaikan penerikan pasukan selama 10 hari sejak penandatanganan persetujuan. Disamping itu, juga tercapai kesepakatan yang mengharuskan Israel untuk melakukan tiga tahap penarikan pasukannya dari wilayah-wilayah pedesaan tepi barat antara bulan maret hingga agustus 1998.

4). Perundingan Wye River I

Perundingan Wye River I merupakan usaha presiden Clinton untuk menundukan kembali kedua belah pihak ke depan meja perundingan sejak desember 1997. Berkat usaha intensif AS untuk mengatasi jalan buntu, Israel dan Palestina berhasil memulai kembali proses perundingan yang sempat terhenti selama berbulan-bulan. Dari pertemuan-pertemuan selama 9 hari di Wye Plantation Maryland, AS. Kemudian tercapai kesepakatan yang menghasilkan memorandum Wye River I tanggal 23 oktober 1998. Ketentuan-ketentuan dari memorandum Wye River I sebenarnya merupakan kelanjutan dari ketentuan Oslo II dan protokol Hebron yang belum tuntas di implementasikan oleh Israel.

5). Perundingan Wye River II

Hasil kesepakatan Wye River I yang tidak diimplementasikan oleh pemerintah Netanyahu diupayakan untuk direalisasikan oleh penggantinya Ehud Barak. Dalam pertemuan Palestina-Israel yang berlangsung di Sharm El Sheikh, Mesir, berhasil ditandatangani sebuah memorandum (yang lebih dikenal sebagai memorandum Wye River II) pada tanggal 4 september 1999. Disamping memuat ketentuan seperti yang sudah disebutkan dalam Wye River I, dalam kesepakatan yang terakhir ini juga dijumpai hal-hal baru serta revisi dari sebagian ketentuan Wye River I, seperti penundaan deklarasi negara Palestina merdeka sampai september 2000, pembatalan 3% cagar alam di lembah Yordan, dan ketentuan tentang dimulainya perundingan status Final. Kesepakatan ini akan berlaku efektif mulai 10 september 1999.

6). Perundingan Camp David II

Perundingan Palestina-Israel yang berlangsung di Camp David, Maryland-AS, selama 15 hari sejak 11 juli hingga 25 juli 2000, sebenarnya lebih didorong oleh sikap tergesa-gesa dan rasa optimisme yang berlebihan terutama dari P.M Ehud Barak dan Presiden Bill Clinton. Munculnya optimisme yang besar dan dialamai oleh Ehud Barak serta Bill Clinton tersebut didasari oleh telah tercapainya beberapa alternatif pemecahan tentang isu-isu paling rumit dalam konflik Palestina-Israel, seperti status kota Jerussalem Timur, masalah pengungsi Palestina, masalah pemukiman Yahudi, pembagian jatah air, dan masalah perbatasan Palestina-Israel. Alternatif-alternatif pemecahan masalah itu antara lain adalah draft kesepakatan rahasia Stockholm dan dokumen AS yang akan digunakan sebagai formula pemecahan jalan tengah.

7). Konferensi Annapolis 2007

Agenda konferensi Annapolis mencakup enam masalah pokok yaitu Negara kedaulatan Palestina, status final kota Jerussalem sebagai ibukota Palestina, perbatasan, pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, keamanan, dan pembagian sumber air. Kesepakatan penting dalam konferensi Annapolis kedua pihak sepakat untuk menciptakan mekanisme monitoring implementasi peta jalan, yang isinya pendirian Negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan damai bersama Israel. Konferensi ini juga menyepakati pengguliran proses negosiasi langsung antara Israel dan Palestina setiap dua minggu sekali dengan Amerika Serikat bertindak sebagai penengah.

Banyak indikator untuk menilai ketidakberhasilan konferensi Annapolis. Awal masa konferensi Annapolis memang terjadi gencatan senjata antara pejuang Hamas dan tentara Israel, terutama di Jalur Gaza selama beberapa bulan. Tetapi disaat presiden Palestina Mahmoud Abbas dan perdana menteri Israel Ehud Olmert berunding, pembangunan pemukiman Yahudi di Al-Quds

Timur justru ditingkatkan oleh pemerintah Isreal. Adapun pasca konferensi Annapolis pertengahan tahun 2008 keadaan Palestina-Israel konflik mulai berkejolak terutama di daerah Gaza yang merupakan basis kelompok Hamas. Pemberlakuan blockade ekonomi oleh Israel di Gaza membuat banyak warga Gaza menderita kelaparan, kekurangan obat, dan kekurangan sumber-sumber kehidupan, misalnya listrik padam, pembatasan bantuan makanan dari masyarakat internasional dan macetnya distribusi bahan bakar.

Kesepakatan akhir dari konferensi Annapolis untuk menciptakan Negara Palestina yang berdaulat berdampingan dengan Negara Isreal yang berdaulat secara damai, tetapi dengan perkembangan situasi konflik Palestina-Israel yang masih rentan proses perdamaian kedua Negara masih jauh dari proses perwujudan perdamaian. Apalagi Israel tetap bertahan dengan kebijakan politiknya yang serba tolak terhadap palestina. Secara tegas Israel menolak pembekuan pembangunan pemukiman yahudi, menolak pembicaraan masa depan tentang Yerusalem yang telah diduduki sejak perang 1967. Dengan demikian Israel secara langsung menghambat proses pembentukan Negara Palestina yang berdaulat, Yerusalem sebagai ibukota Palestina. Namun pada kenyataannya Amerika Serikat tetap saja berkeinginan untuk menjadi juru damai terhadap negosiasi dan resolusi konflik Israel-Palestina tersebut. Pada era kepemimpinan Barack Obama upaya mediasi Amerika Serikat terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel dijalankan melalui mekanisme negosiasi langsung (Direct Negotiation Between Israel and Palestinians) pada 2 September 2010.

Mediasi atas prakarsa Amerika Serikat ini dijalankan melalui forum tripartit yang terdiri dari tiga perwakilan, yaitu:

- Presiden Amerika Serikat Barack Obama sebagai fasilitator negosiasi langsung.
- Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sebagai wakil dari Israel.
- Mahmoud Abbas sebagai wakil dari ketua otoritas Palestina.

Prakarsa Barack Obama yang diharapkan dapat menjadi perundingan akhir ke arah perdamaian ternyata mengalami kegagalan seperti halnya perundingan-perundingan sebelumnya. Sebelum negosiasi langsung yang diadakan pada September 2010 diatas terealisasi, Barack Obama juga telah melakukan pembicaraan empat mata baik dengan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan pemimpin Israel Benyamin Netanyahu.

Beberapa pertemuan yang berhasil terealisasi antara lain :

a. Pengiriman utusan Amerika Serikat sebagai wakil Obama, George Mitchell ke Palestina untuk bertemu dengan pemimpin otoritas Mahmoud Abbas pada 10 Mei 2009 di Ramallah. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Pelestina akibat pembangunan pemukiman Yahudi.

b. Pertemuan Obama dan Netanyahu pada tanggal 25 Maret 2010 di Washington. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan wakil presiden Amerika Serikat Joseph Biden pada 9 Maret 2010. Dalam pertemuan tersebut Obama menyatakan bahwa Netanyahu menolak berbagai masukan dari Obama untuk membatalkan pembangunan Baitul Maqdis Timur.

c. Pertemuan antara Obama dan Netanyahu pada 10 September 2010 di Gedung Putih. Pertemuan ini tidak digelar secara terbuka, wartawan dilarang masuk dan hanya berlangsung kurang dari 40 menit. Setelah pertemuan tersebut Obama menyampaikan dalam konferensi pers bersama bahwa Israel akan bermurah hati mengendalikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat. Selain mengadakan pertemuan secara bilateral dengan pihak Israel, Barack Obama juga berhasil menggelar beberapa forum pertemuan dengan pihak Palestina, meskipun secara tidak langsung.

Hal ini sebagai berikut :

- Pengiriman utusan Amerika Serikat sebagai wakil Obama, George Mitchell ke Palestina untuk bertemu dengan pemimpin otoritas Mahmoud Abbas pada 10 Mei 2009 di

Ramallah. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Palestina akibat pembangunan pemukiman Yahudi.

- Pertemuan perwakilan Amerika Serikat Joe Biden pada bulan Maret 2010 yang gagal mencapai kesepakatan tentang konsesi bersama karena pihak Israel terlebih dulu menguasai lahan pemukiman di Tepi Barat.

Pembicaraan melalui telepon antara Barack Obama dengan Mahmoud Abbas pada 10 Juli 2010. Dalam pembicaraan tersebut akan diusahakan tentang prakarsa Amerika Serikat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Palestina dan Israel untuk dapat hidup berdampingan. Sejak Peretujuan Oslo, Pemerintah Israel dan Otoritas Nasional Palestina secara resmi telah bertekad untuk akhirnya tiba pada solusi dua negara.

Masalah-masalah utama yang tidak terpecahkan di antara kedua pemerintah ini adalah:

- ❖ Status dan masa depan Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur yang mencakup wilayah-wilayah dari Negara Palestina yang diusulkan.
- ❖ Keamanan Israel.
- ❖ Keamanan Palestina.
- ❖ Hakikat masa depan negara Palestina.
- ❖ Nasib para pengungsi Palestina.
- ❖ Kebijakan-kebijakan pemukiman pemerintah Israel, dan nasib para penduduk pemukiman itu.
- ❖ Kedaulatan terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Bukit Bait Suci dan kompleks Tembok (Ratapan) Barat.

Masalah pengungsi muncul sebagai akibat dari perang Arab-Israel 1948. Masalah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur muncul sebagai akibat dari Perang Enam Hari pada 1967. Selama ini telah terjadi konflik yang penuh kekerasan, dengan berbagai tingkat intensitasnya dan konflik gagasan, tujuan, dan prinsip-prinsip yang berada di balik semuanya. Pada kedua belah pihak, pada berbagai kesempatan, telah muncul kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dalam berbagai tingkatannya tentang pengajuan atau penggunaan taktik-taktik kekerasan, anti kekerasan yang aktif, dan lain-lain.

(b). **Tanggapan Dunia Internasional.**

Sejalan dengan sidang Liga Arab itu, sidang pimpinan Palestina juga menegaskan menolak kompromi dengan Israel soal Kota Jerussalem timur. Satu-satunya jalan untuk menciptakan perdamaian yang adil adalah komitmen Israel melaksanakan resolusi PBB. Palestina menolak rancangan penyelesaian yang diajukan Israel karena bertentangan dengan resolusi PBB. Utusan khusus Amerika Serikat Dennis Ross usai bertemu Yasser Arafat di Ramallah mengatakan, perbedaan pendapat Palestina-Israel soal isu-isu status final masih mendalam, namun kami akan terus berusaha untuk menyempitkan perbedaan tersebut. Ross melakukan pertemuan ulak-alik dengan PM Israel Ehud Barak dan Pemimpin Palestina Yasser Arafat di Jerussalem dan Ramallah dalam upaya menjembatani perbedaan pendapat Palestina-Israel, khususnya soal Kota Jerussalem. Selain suara dukungan yang berasal dari bangsa-bangsa Arab yang tergabung dalam Liga Arab, dukungan terhadap gerakan rakyat Palestina juga terlihat dari Negara-negara yang tergabung dalam OKI. KTT OKI yang pertama di Rabat, Maroko, pada bulan September 1969 menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat negara-negara Islam menolak penyelesaian isu Palestina yang tidak menjamin kembalinya kota Jerussalem pada statusnya yang semula sebelum Juni 1967. KTT OKI ketiga di Taif, Arab Saudi, pada bulan Januari 1980, menyerukan jihad untuk pembebasan Kota Jerussalem. Mereka menafsirkan jihad tersebut adalah menolak tindakan provokatif Israel sesuai dengan hukum internasional yang menjamin hak membela diri sebagaimana tertera pada bab 51 piagam PBB. Dukungan yang diberikan Negara-negara Arab terhadap gerakan rakyat Palestina bahkan terlihat ketika HAMAS memenangkan pemilu yang diselenggarakan pada 25 Januari 2006. Menteri Luar Negeri Amerika

Serikat Condoleeze Rice setelah mengetahui kemenangan HAMAS segera ia melakukan kunjungan ke beberapa Negara Arab, terutama Mesir dan Saudi Arabia. Target dari kunjungan itu antara lain agar kedua negara tersebut tidak memberikan bantuan keuangan kepada pemerintahan Otoritas Palestina di bawah HAMAS. Namun, Mesir dan Saudi Arabia dengan tegas menolak permintaan Rice tersebut. Menyusul meletusnya gerakan Intifadah II yang terjadi pada 28 September 2000, para Menteri Luar Negeri Delapan Negara (G-8) : Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, Rusia, telah mengeluarkan resolusi tentang Timur Tengah di G8, Italia. Resolusi para menteri itu menyatakan bahwa keputusan untuk gencatan senjata merupakan satu-satunya langkah cooling down secepat mungkin, dan ini berarti radikalisme dan terorisme harus dihentikan, dan keduanya tidak mungkin ditolerir. Agar keamanan yang menyejukkan bisa terwujud, maka seluruh perjanjian yang dibuat untuk memberikan jaminan bagi penghentian aktivitas kekerasan harus selalu dikontrol dengan teliti. Masing-masing pihak tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa merugikan pihak lain. Dalam kondisi semacam ini, bahwa pengawasan dari pihak ketiga, yang disepakati oleh kedua belah pihak, akan sangat membantu mewujudkan kepentingan kedua belah pihak dalam melaksanakan keputusan gencatan senjata. Pernyataan-pernyataan di atas telah menggambarkan bagaimana sikap dunia internasional terhadap peristiwa politik yang terjadi di Palestina, terutama sikap Amerika sebagai Negara super power, dan sikap negara-negara besar lainnya, yaitu Inggris, Perancis, dan Rusia. Sedangkan Negara-negara lainnya, yang merupakan sekutu Amerika, seperti : Jerman, Jepang atau sekutu Inggris seperti Kanada, ataupun negara-negara yang baru mengorbit Amerika pada saat ini, posisinya tidaklah begitu penting kecuali hanya sebagai penggembira saja.

(c). **Upaya PBB dan Peran Dunia Internasional.**

Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel yaitu :

- Resolusi tentang HAM Resolusi A/55/133 isinya mengenai tindakan –tindakan Israel yang melakukan pelanggaran terhadap rakyat Palestina (mengenai pencaplokan, pendirian perkampungan Yahudi dan penutupan daerah). Dalam resolusi ini, Majelis Umum menitik beratkan pada perlunya menjaga integritas teritorial seluruh wilayah pendudukan Palestina, termasuk menghilangkan pembatasan yang dilakukan oleh Israel.
- Resolusi A/55/128 mengenai tanah kepemilikan Palestina sesuai dengan Prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.
- Resolusi A/56/142 hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri.
- Upaya pembentukan road map yang disepakati oleh komite Kwartet, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa dan Sekjen PBB.
- Resolusi PBB No.181 tahun 1947 mengenai pembagian wilayah bagi bangsa Palestina dan Yahudi.
- Pembentukan komisi I khusus untuk mengatasi menangani masalah pengungsi Palestina, yaitu UN Conciliation Commission For Palestine (UNCCP) yang kemudian pada tahun 1950 juga membentuk sebuah badan Pengungsi Palestina dengan nama UN Relief and Works Agency (UNRWA).
- Resolusi No. 194 yang berbunyi :
“Majelis umum menegaskan bahwa harus di izinkan secepat mungkin bagi pengungsi yang ingin kembali kerumah mereka dan hidup damai dengan tetangganya, dan demikian juga harus mendapat ganti rugi dari harta benda yang ditinggalka, dan mendapat ganti rugi dari kerugia atau kerusakan harta benda sesuai dengan hukum Internasional dan standar keadilan bagi mereka yang tidak ingin kembali lagi.”
- Resolusi No. 338 penyeruan mengenai gencatan senjata bagi pihak yang bertikai dan mengakhiri aksi bersenjata kedua pihak
- Resolusi No. 1276 yang meminta kedua pihak serius untuk menghentikan gencatan senjata.

- Oktober 2000 DK menyetujui resolusi yang mengecam penggunaan kekuatan berlebihan, yaitu no. 1322 dimana Dk PBB menyatakan sangat prihatin dalam peristiwa tragis yang membawa banyak kematian dan kerugian dan kebanyakan orang-orang Palestina. Dibawah kepemimpinan Ariel Sharon, Israel justru menunjukkan eskalasi militer dan Politik. Israel mengerahkan pasukan bersenjata ke tepi barat dan membantai orang-orang Palestina di kamp pengungsi di Jenin, Balata, Rammalah, Aida, Dir Balah dan Deheish sejak awal hingga pertengahan Juni 2002.
- Resolusi no. 1937 12 maret 2002, yang meminta dengan segera penghentian semua tindakan kekerasan termasuk tindakan menerror, penghasutan dan pengrusakan. Tanggapan dari Resolusi ini yaitu, pada tanggal 20 maret pejuang palestina melakukan aksi bom bunuh diri di dekat kota Umm Al-Fahm, Israel Utara dan juga dekat kota Yerusalem hingga sebagai balasannya PM Ariel Sharon mengumumkan deklarasi perang serta mengerahkan pasukannya lengkap dengan persenjataan dan alat-alat berat ke kota Ramallah, untuk mengepung Yasser Arafat
- Resolusi No 1402 pada tanggal 30 Maret 2002, secara aklamasi meminta kedua pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata, serta agar Israel menarik pasukannya dari kota Palestina, termasuk wilayah Istana pemimpin palestina Yaseer Arafat. Kenyataannya Israel tetap tidak menarik pasukannya, aksi penyanderaan Yaser Arafat diiringi dengan penghancuran hampir seluruh bangunan Istana Kepresidenan dengan penghancuran Bom
- Resolusi PBB NO. 1403 4 april 2002 membawa mereka ke meja perundingan untuk membicarakan kesepakatan perdamaian, dan menghasilkan Peta perdamaian 16 juli 2002 di New YORK
- Juli 2004 resolusi ES-10 yang secara resmi mendesak Israel untuk menghentikan dengan segera pembangunan tembok pemisah antara Palestina dan Israel.

Dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan Palestina perlu dioptimalkan dan diarahkan setidaknya kepada tiga hal, yaitu :

Pertama, bangsa Palestina harus dibebaskan dari komoditas politik Amerika Serikat. Selama ini Amerika Serikat telah menggunakan isu Palestina sebagai jalan masuk untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di wilayah tersebut, dan Timur Tengah pada umumnya. Dominasi Amerika dalam urusan ini harus dikurangi. Perlu diingat bahwa kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat tidaklah selamanya merupakan cerminan atau pandangan dari masyarakat sipil Amerika sendiri. Tekanan publik dalam negeri Amerika terhadap pemerintahnya sedikit banyak ikut berpengaruh pada pilihan politik luar negeri negara ini. Pemerintah baru Amerika Serikat diharapkan dapat mengambil jalan lain yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik Palestina.

Kedua, perlunya tekanan yang lebih kuat dari masyarakat internasional kepada Israel atas dasar penghormatan terhadap prinsip-prinsip universal hubungan antar negara yang bersifat anti penindasan, anti penjajahan dan menentang segala bentuk kolonialisme. Apa yang dilakukan Israel terhadap wilayah-wilayah Palestina jelas merupakan bentuk kolonialisme yang terjadi di jaman modern ini. Hak hidup suatu bangsa haruslah dihormati oleh bangsa lain. Bangsa Palestina, secara historis, memiliki hak penuh atas wilayahnya yang diduduki Israel.

Ketiga, bebaskan bangsa Palestina dari penjara terbesar di dunia yang dibangun oleh Israel. Antara daerah Israel dan daerah-daerah Palestina dibangun suatu tembok pemisah oleh Israel. Tembok ini didirikan dengan alasan untuk menanggulangi kemungkinan bom bunuh diri yang dilakukan oleh relawan Palestina. Namun keberadaan tembok pemisah ini dikecam karena mengganggu kehidupan penduduk Palestina. Pada sisi lain, dibangunnya tembok ini mencerminkan kerakusan Israel untuk mencaplok daerah yang statusnya belum begitu jelas.

Di samping langkah-langkah tersebut, ada juga usulan lain yang perlu diapresiasi. Yaitu, mengimplementasikan hak pulang para pengungsi Palestina, sebagaimana diamanatkan Resolusi PBB. Ini adalah syarat fundamental bagi tercapainya keadilan sekaligus menjadi prasyarat mutlak bagi perdamaian di antara komunitas-komunitas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan diatas dapat disimpulkan yang mana posisi Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel adalah Amerika Serikat cenderung memihak pada Israel. Dimana hampir sebagian besar penduduk Amerika Serikat adalah keturunan Yahudi, dan mereka pun mempunyai organisasi-organisasi yang terstruktur yang menduduki posisi-posisi tertentu di dalam pemerintahan. Dan hampir sebagian besar perekonomian Amerika Serikat di kuasai oleh orang Yahudi. Bahwa konflik Palestina-Israel merupakan perpanjangan dari konflik Arab-Israel. Konflik antara Palestina-Israel adalah merupakan sengketa wilayah yang mana telah dilakukan pembagian wilayah PBB tetapi pembagian tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak sehingga timbulah konflik diantara kedua belah pihak. Konflik Palestina-Israel bukan konflik SARA, melainkan akan menjurus ke konflik SARA.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah organisasi yang menaungi hampir seluruh negara telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi terealisasinya perdamaian kedua bangsa ini. Begitu banyak resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan, tetapi kesemuanya tidak membuahkan hasil. Amerika Serikat yang sekaligus sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel tidak menghasilkan apapun. Palestina ingin diakui sebagai sebuah Negara. Perlawanan rakyat Palestina muncul dalam bentuk perjuangan politik dan militer. Gerakan ini bernuansa Islam seperti Hamas, Brigade Izzudin Al-Qassam, Islamic Jihad Movement, Brigade Martir Al-Aqsha. Gerakan ini juga mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Menanggapi konflik antara Palestina dan Israel yang tidak kunjung usai beserta berbagai gerakan yang ada di Palestina ini, terdapat respon yang berbeda dari Negara-negara Arab dan di dunia Barat. Tanggapan dunia Barat khususnya terhadap otoritas Palestina yang dipimpin Hamas adalah tidak terlalu mendukung. Hal ini disebabkan karakter Hamas yang dahulu sering tidak bekerjasama dengan dunia Barat, lain halnya dengan karakter PLO maupun Fatah yang cenderung kooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

Armstrong Karen, 2011, *Perang Suci*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.

Mearsheimer John J, Walt Stephen M, 2010, *Dahsyatnya Lobi Israel*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Maarif Ahmad Syafii, 2012, *Gilad Atzmon: Catatan Kritis tentang Palestina dan Masa Depan Zionisme*, Mizan, Bandung.

Sihbudi Riza, Syamsuddin M. Din, 2007, *Menyandera Timur Tengah*, Mizan Publika Jakarta.

Zainudin Moh, 2011, *Jejak-Jejak Nyata Amerika Mengobok-Obok Wajah Dunia*, Laksana, Jogjakarta.

Sumber-sumber lainnya :

- <http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/04/sejarah-konflik-palestina-israel.html>
- <http://www.jurnas.com/halaman/17/2012-01-26/196833>